



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI

# LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

## PEMERINTAH KAB. MAJALENGKA



*Sinergi untuk Indonesia Maju*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**NANIK MURWATI**

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata  
Laksana

NIP. 197208081996032001

# EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

## Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

## Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

## Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

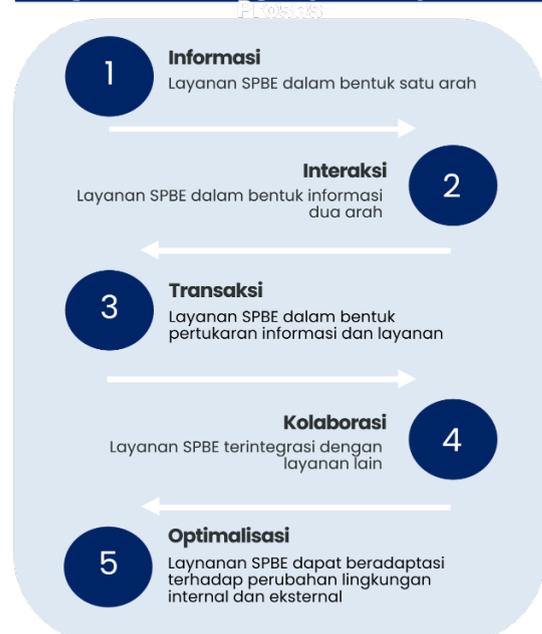
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

## Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

### Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



### Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



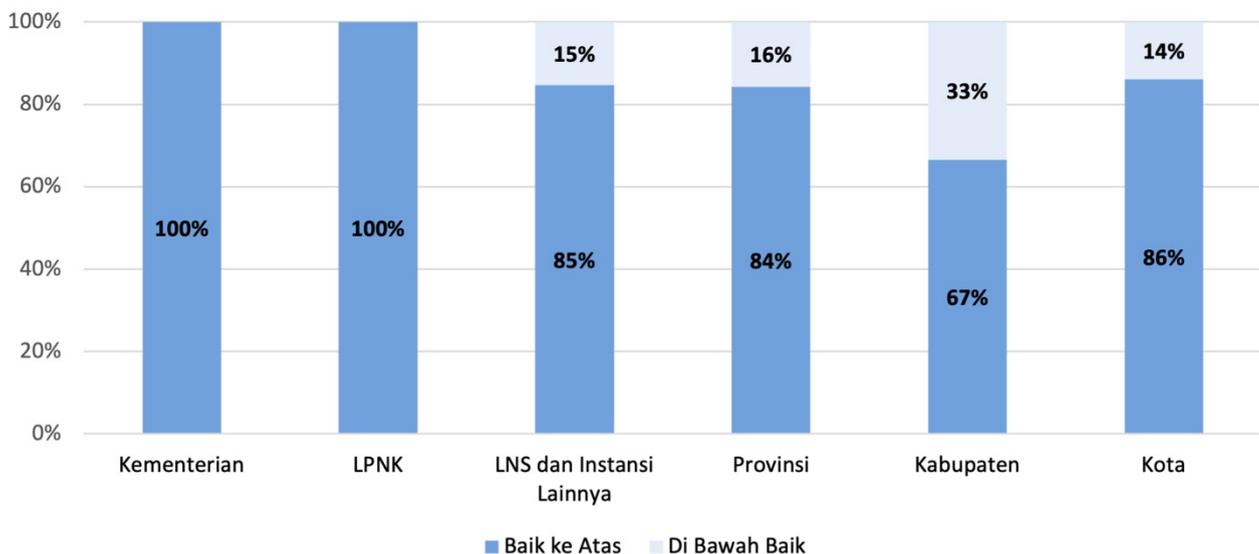
# EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
<b>Domain 1 - Kebijakan SPBE</b>	<b>13%</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – &lt; 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – &lt; 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – &lt; 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>&lt; 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
<b>Domain 2 - Tata Kelola SPBE</b>	<b>25%</b>																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
<b>Domain 3 - Manajemen SPBE</b>	<b>16,5%</b>																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
<b>Domain 4 - Layanan SPBE</b>	<b>45,5%</b>																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

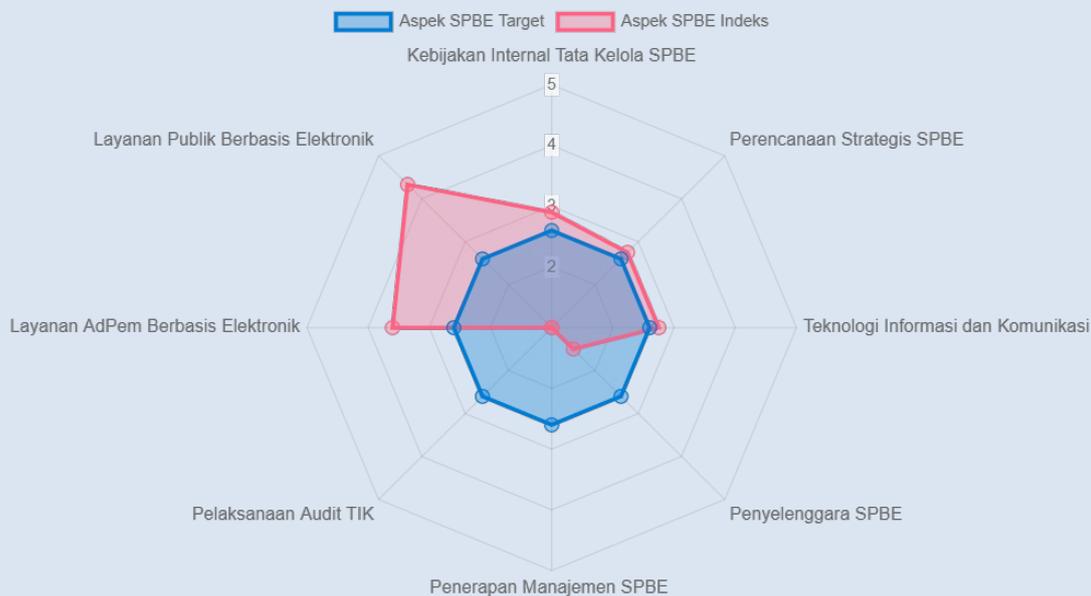
\*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
<b>SPBE</b>	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
<b>Domain Kebijakan</b>	<b>3,36</b>	<b>4,28</b>	<b>4,01</b>	<b>3,61</b>	<b>3,61</b>	<b>2,51</b>	<b>3,64</b>
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
<b>Domain Tata Kelola</b>	<b>2,62</b>	<b>3,92</b>	<b>3,65</b>	<b>3,11</b>	<b>3,07</b>	<b>1,69</b>	<b>2,94</b>
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
<b>Domain Manajemen</b>	<b>1,86</b>	<b>2,87</b>	<b>2,61</b>	<b>2,31</b>	<b>2,17</b>	<b>1,13</b>	<b>2,03</b>
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>3,78</b>	<b>4,44</b>	<b>4,26</b>	<b>3,81</b>	<b>3,98</b>	<b>3,32</b>	<b>4,05</b>
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

**Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024**



**Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek**



<b>Nama Indeks</b>	<b>Nilai 2024</b>
<b>SPBE</b>	<b>2,94</b>
<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	2,90
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	2,90
<b>Domain Tata Kelola SPBE</b>	2,50
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	2,75
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	2,75
<i>Penyelenggara SPBE</i>	1,50
<b>Domain Manajemen SPBE</b>	1,00
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,00
<i>Audit TIK</i>	1,00
<b>Domain Layanan SPBE</b>	3,89
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	3,60
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	4,33

## KEKUATAN DAN KELEMAHAN

### A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE pada Pemkab Majalengka yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Majalengka adalah dengan adanya Kebijakan Internal Manajemen Data, Kebijakan Internal Layanan Pusat Data, Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra, Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi, Kebijakan Internal Audit TIK, dan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE.

- Kekuatan  
Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE ini dapat terlihat adanya Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE. menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Majalengka.
- Kelemahan  
Namun di sisi lain, Pemkab Majalengka masih belum memiliki kebijakan internal yang mengatur terkait Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE, dan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE., di mana pengaturan yang disampaikan belum memenuhi kriteria kematangan lebih dari tingkat 2.

### B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan Aspek Perencanaan Strategis SPBE pada Pemkab Majalengka yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Majalengka adalah dengan adanya Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.

- Kekuatan  
Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini dapat terlihat adanya Arsitektur SPBE menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Majalengka.
- Kelemahan  
Namun di sisi lain, Pemkab Majalengka masih belum memiliki dokumentasi tata kelola terkait Rencana dan Anggaran SPBE dan Inovasi Proses Bisnis SPBE., di mana pengaturan yang disampaikan belum memenuhi kriteria kematangan lebih dari tingkat 2.

### C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Pemkab Majalengka yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Majalengka adalah dengan adanya Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan.

- Kekuatan  
Pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi ini belum terlihat adanya indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Majalengka.
- Kelemahan  
Pemkab Majalengka masih belum memiliki dokumentasi tata kelola terkait Pembangunan Aplikasi SPBE dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan., di mana pengaturan yang disampaikan belum memenuhi kriteria kematangan lebih dari tingkat 2.

### D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan Aspek Penyelenggara SPBE pada Pemkab Majalengka yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Majalengka adalah dengan adanya Tim Koordinasi SPBE.

- Kekuatan  
Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini belum terlihat adanya indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Majalengka.
- Kelemahan  
Pemkab Majalengka masih belum memiliki dokumentasi tata kelola terkait Tim Koordinasi SPBE dan Kolaborasi Penerapan SPBE., di mana pengaturan yang disampaikan belum memenuhi kriteria kematangan lebih dari tingkat 2.

### E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan Aspek Penerapan Manajemen SPBE pada Pemkab Majalengka yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Majalengka adalah dengan adanya Tim Koordinasi SPBE.

- Kekuatan  
Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini belum terlihat adanya indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Majalengka.
- Kelemahan  
Pemkab Majalengka masih belum memiliki penerapan terkait Manajemen Risiko SPBE, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen Sumber

Daya Manusia, Manajemen Pengetahuan, Manajemen Perubahan, dan Manajemen Layanan SPBE., di mana peta rencana tidak ada program dan kegiatan yang eksplisit. Hanya muncul inisiatif strategis serta output yang diharapkan..

#### F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan Aspek Pelaksanaan Audit TIK pada Pemkab Majalengka belum ada satu pun indikator yang memenuhi.

- Kekuatan  
Pada Aspek Pelaksanaan Audit TIK ini belum terlihat adanya indikator yang menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Majalengka.
- Kelemahan  
Pemkab Majalengka masih belum memiliki penerapan terkait Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE., di mana peta rencana tidak ada program dan kegiatan yang eksplisit. Hanya muncul inisiatif strategis serta output yang diharapkan..

#### G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemkab Majalengka yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Majalengka adalah dengan adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Keuangan, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan., Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara, Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan  
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Perencanaan, Layanan Penganggaran, Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, Layanan Kepegawaian, Layanan Kearsipan, Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Layanan Kinerja Pegawai. menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Majalengka.
- Kelemahan  
Pemkab Majalengka tidak memiliki kelemahan di aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik.

#### H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik pada Pemkab Majalengka yang sudah dipenuhi oleh Pemkab Majalengka adalah dengan adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Data Terbuka, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektoral 1, Layanan Publik Sektoral 2 dan Layanan Publik Sektoral 3.

- Kekuatan  
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat adanya Layanan Pengaduan Pelayanan Publik, Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Layanan Publik Sektoral 1, Layanan Publik Sektoral 2. dan Layanan Publik Sektoral 3. menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemkab Majalengka.
- Kelemahan  
Pemkab Majalengka tidak memiliki kelemahan di aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik .

## REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi SPBE pada Pemkab Majalengka tahun 2024, secara keseluruhan telah mencapai predikat "Baik" dengan pencapaian yang menonjol pada aspek-aspek layanan, namun masih memerlukan perbaikan pada beberapa aspek fundamental.

Dalam implementasi SPBE, Pemkab Majalengka telah berhasil mengembangkan layanan-layanan unggulan yang mencapai tingkat kematangan optimal (level 5), khususnya pada layanan publik sektoral. Aplikasi Bangkit untuk pengentasan kemiskinan, SIDAKU untuk kemudahan investasi, dan Sibeunteur Geulis untuk pemberdayaan UMKM menunjukkan komitmen pemda dalam menghadirkan layanan yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Layanan administrasi pemerintahan juga menunjukkan kinerja yang baik dengan mayoritas layanan telah mencapai tingkat kematangan 4, seperti layanan perencanaan, penganggaran, kepegawaian, dan kearsipan yang telah menggunakan aplikasi umum berbagi pakai dan berkolaborasi dengan sistem nasional. Hal ini menunjukkan keberhasilan dalam mengadopsi dan mengintegrasikan sistem yang telah disediakan pemerintah pusat.

Namun, terdapat beberapa kelemahan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, aspek kebijakan internal tata kelola SPBE masih belum memiliki landasan yang kuat, dimana kebijakan terkait arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, dan pembangunan aplikasi SPBE belum memenuhi kriteria kematangan yang diharapkan. Hal ini dapat menghambat arah pengembangan SPBE yang terencana dan terukur.

Kedua, aspek penerapan manajemen SPBE menunjukkan kelemahan signifikan dengan mayoritas komponen masih berada pada tingkat kematangan 1. Manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset TIK, SDM, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE belum memiliki program dan kegiatan yang terarah. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko dalam keberlanjutan dan keamanan sistem yang telah dibangun.

Ketiga, aspek audit TIK belum berjalan optimal dimana pelaksanaan audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE masih berada pada tingkat kematangan 1. Hal ini menunjukkan belum adanya mekanisme evaluasi dan penjaminan kualitas yang memadai terhadap sistem yang berjalan.

Berdasarkan kondisi tersebut, beberapa rekomendasi prioritas yang perlu dilakukan:

1. Penguatan Kebijakan dan Tata Kelola:
  - Menyusun dan menetapkan kebijakan arsitektur SPBE yang komprehensif mencakup 6 domain arsitektur SPBE
  - Mengembangkan peta rencana SPBE yang terukur dengan program dan kegiatan yang jelas
  - Menetapkan kebijakan pembangunan aplikasi yang mencakup seluruh siklus pengembangan
2. Pengembangan Manajemen SPBE:
  - Menyusun program dan kegiatan manajemen SPBE yang terarah dan terencana untuk setiap aspek manajemen
  - Mengembangkan pedoman teknis untuk setiap aspek manajemen
  - Membangun sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan manajemen SPBE
3. Penguatan Fungsi Audit:
  - Menyusun rencana audit TIK yang komprehensif mencakup infrastruktur, aplikasi dan keamanan
  - Mengembangkan kapasitas tim audit internal
  - Melaksanakan audit secara berkala dan menindaklanjuti hasil temuan
4. Pengembangan Kapasitas SDM:
  - Meningkatkan kompetensi SDM dalam tata kelola dan manajemen SPBE
  - Melakukan transfer knowledge untuk keberlanjutan sistem
  - Mengembangkan budaya kerja berbasis elektronik

Dengan implementasi rekomendasi tersebut secara sistematis dan terukur, diharapkan Pemkab Majalengka dapat meningkatkan kematangan SPBE secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek layanan tetapi juga pada aspek fundamental yang mendukung keberlanjutan sistem

## Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

*Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)*

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	2
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	3
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	3
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	5
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	3
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	4
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	2
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	3
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	4
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5



**panrb**

KEMENTERIAN  
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
DAN REFORMASI BIROKRASI



*Sinergi untuk Indonesia Maju*

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana  
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  
2024